

ABSTRAK

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu bentuk dari eksplorasi terhadap bumi, sehingga di dalam penguasaannya ini seharusnya dilakukan oleh negara. Disamping mendapatkan keuntungan kegiatan pertambangan juga memberikan dampak negatif yaitu di dalam kegiatan pertambangan selalu di identikkan dengan permasalahan yang terjadi terhadap lingkungan terutama yang tidak mempunyai izin. Salah satunya nya ialah kasus penambangan fosfat yang dilakukan oleh masyarakat terjadi di Batu Putih Daya di Kabupaten Sumenep, ditemukan beberapa perusahaan kegiatan pertambangan tanpa disertai izin sehingga apabila penambangan fosfat tetap dilakukan, kerusakan lingkungan pasti terjadi termasuk salah satunya keberlangsungan kehidupan masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), dengan pendekatan Perundang-undangan, terhadap pendekatan tersebut dilakukan untuk meneliti kasus ataupun dapat meneliti terhadap problematika di masyarakat yang timbul dan sudah atau sedang terjadi di masyarakat, yang nantinya kasus juga dapat di telaah dan dikaji lebih lanjut yang berdasarkan tata peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari aspek substansi pengaturan peraturan perundang-undangan terkait sanksi dan Pasal yang mengatur terkait pertambangan tanpa izin sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, Dari aspek penegak hukum itu sendiri terhambat dengan tidak adanya wewenang yang dimiliki karena berdasar UU Minerba kewenangan sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Sehingga dalam pelaksanaannya masih pasif dan menunggu adanya laporan baru akan dilakukan penindakan, itupun sanksi yang diberikan sejauh ini hanya sebatas penutupan dan ada beberapa pertambangan yang ditutup namun aktif melakukan pertambangan kembali. Dan dari aspek sarana prasarana masih kurang memadai serta kebudayaan masyarakat terkait kurangnya perngetahuan tentang mekanisme pengurusan izin.

Kata kunci : Fosfat, Minerba, Batuputih.

ABSTRACT

Mining activities are a form of exploration of the earth, so that in its control it should be carried out by the state. Besides benefiting from mining activities, it also has a negative impact, namely mining activities are always identified with problems that occur to the environment, especially those who do not have permits. One of them is the case of phosphate mining carried out by the community in Batu Putih Daya in Sumenep Regency, it was found that several mining activities were not accompanied by a permit so that if phosphate mining was carried out, environmental damage would inevitably occur, including the sustainability of people's lives. The type of research carried out is the type of normative-empirical legal research (applied law research), with a Legislative approach, the approach is carried out to examine cases or can examine problems in society that arise and have or are happening in society, which later cases can also be studied and studied further based on the existing statutory regulations. The results of the study indicate that from the aspect of the substance of the regulation of laws and regulations related to sanctions and articles that regulate mining without a permit, it is regulated in Law Number 3 of 2020 concerning Minerba Mining. From the aspect of law enforcement itself, it is hampered by the absence of authority due to under the Minerba Law, the full authority lies with the central government. So that in its implementation it is still passive and waiting for a new report to take action, and even then the sanctions given so far are only limited to closure and there are several mines that are closed but are actively mining again. And from the aspect of infrastructure, it is still inadequate and the culture of the community is related to the lack of knowledge about the mechanism for managing permits.

Key words : Phosphate, Minerba, Batuputih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Sumber Data	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	13
1.6.5 Analisis Data	14
1.7 Sistematika Penulisan	17

BAB II BEBERAPA HAL TENTANG PENEGAKAN HUKUM ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN FOSFAT

2.1 Pencemaran Lingkungan di Indonesia	18
2.1.1 Pengertian Pencemaran Lingkungan	18
2.1.2 Macam-macam Pencemaran Lingkungan	20
2.2 Tindak Pidana Pertambangan Fosfat	26
2.2.1 Pengertian Pertambangan dan Tindak Pidana Pertambangan	26
2.2.2 Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin	28
2.2.3 Pengertian Fosfat	31
2.3 Penegakan Hukum	32
2.3.1 Pengertian Penegakan Hukum	32
2.3.2 Teori Penegakan Hukum	34
2.3.3 Teori Sistem Hukum.....	37
2.4 Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalli</i>	38
2.3.1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai <i>Lex Generalli</i>	40
2.3.2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai <i>Lex Speciallis</i>	41

BAB III PENEGAKAN HUKUM ATAS PENAMBANGAN LIAR OLEH MASYARAKAT BATU PUTIH KABUPATEN SUMENEP.....	42
3.1 Mekanisme Penegakan Hukum Penambangan Liar di Kabupaten Sumenep	42
a. Pengaturan Penambangan Liar	42
b. Implementasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan terhadap Pelaku Kegiatan Penambangan Fosfat Liar di Kabupaten Sumenep	48
c. Hambatan dan Kekurangan dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana Lingkungan terhadap Pertambangan Tidak Mempunyai Izin	52
3.2 Dampak Kerusakan Lingkungan sebagai Akibat Pertambangan Liar Fosfat di Batu Putih Kabupaten Sumenep	58
a. Gambaran Geografis dan Administrasi Kabupaten Sumenep.....	58
b. Dampak Kerusakan Lingkungan sebagai Akibat Pertambangan Liar Fosfat di Batu Putih Kabupaten Sumenep	62
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	75